

**PROSIDING
SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI
VOKASI KE-3**

Tema :

**MENGONSTRUKSI RISET AKUNTANSI
BERBASIS PENDIDIKAN VOKASI**

Tim Editor:

Yossi Septriani, SE., M. Acc., Ak.

Endrawati, SE., M. Kom., Ak.

Hidayatul Ihsan, Ph.D., Ak.

12-14 JUNI 2014

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI PADANG**

Kampus UNAND Limau Manis-Padang



ARTIKEL

PERPAJAKAN (PPJK)



PPJK 02

**PERENCANAAN PAJAK DALAM MEMINIMUMKAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN TERHUTANG**

Muhammad Azis

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar

Fajriani Azis

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar

azis_feunm@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan Pajak Penghasilan Badan sebelum dan setelah perencanaan pajak dalam meminimumkan Pajak Penghasilan Badan terutang. Penelitian ini menggunakan analisis komparatif dan uji t dua sampel berpasangan. Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu perencanaan pajak yang diukur dengan besarnya kenaikan/penurunan pajak dengan satuan pengukuran persentase (persen) dan Pajak Penghasilan Badan terutang yang diukur dengan menghitung besarnya laba kena pajak dikalikan dengan tarif pajak dalam persen. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan laba rugi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan laba rugi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2009-2011. Hasil perbandingan besarnya Pajak Penghasilan Badan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. sebelum dan setelah perencanaan pajak yaitu tahun 2009 menurun sebesar 5,27%, tahun 2010 menurun sebesar 6,04%, dan tahun 2011 menurun sebesar 8,86%.

Kata kunci : Perencanaan pajak, pajak penghasilan badan terutang

Abstract

This study aims to determine the differences in corporate income tax before and after the tax planning to minimize corporate income taxes payable. This study uses comparative analysis and paired two-sample t test. This study consisted of two variables, namely tax planning as measured by the magnitude of the increase/decrease in tax planning with units of measurement percentage (percent) and corporate income tax payable is measured by calculating the amount of taxable income multiplied by the tax rate in percent. The population in this study is the income statement of PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. and samples in this study is the income statement 3 (three) years is 2009-2011. The results of the comparison Corporate Income Tax amount of PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. before and after tax planning in 2009 decreased by 5.27 %, in 2010 decreased by 6.04 %, and in 2011 decreased by 8.86% .

Keywords : tax planning, corporate income tax,

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan tugas pemerintahannya untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya memerlukan dana yang besar baik untuk pengeluaran pembangunan maupun untuk

pengeluaran rutin. Salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial yaitu dari pajak yakni mencapai lebih dari 70 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah melalui perpajakan untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak salah satu diantaranya adalah melalui perencanaan pajak (*tax planning*). Kebijakan *tax planning* sebagai suatu strategi agar para wajib pajak termasuk pihak manajemen perusahaan lebih tertarik memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan *tax planning* ini diharapkan kepada wajib pajak tidak merasa dibebani dengan kewajiban pajaknya yang besar, sehingga pihak manajemen perusahaan tidak berpikir bagaimana menghindari pajak secara tidak legal.

Berbagai fungsi dari manajemen, salah satu diantaranya adalah perencanaan. Inti dari fungsi perencanaan adalah proses penentuan tujuan perusahaan dan kemudian menentukan dan menyajikan strategi, serta tata cara pelaksanaan operasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan. Sebagai wajib pajak, perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pajak adalah beban bagi perusahaan, sehingga pada umumnya perusahaan tidak suka rela atau tidak dengan senang hati membayar pajak. Pajak adalah iuran yang sifatnya dipaksakan sehingga negara membutuhkan ketaatan. Suka tidak suka, rela tidak rela, yang penting bagi negara adalah perusahaan tersebut telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, maka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak. Namun demikian penghindaran pajak harus dilakukan dengan cara-cara yang legal agar tidak menimbulkan masalah bagi perusahaan di kemudian hari.

Penghindaran pajak dengan cara ilegal adalah penggelapan pajak. Hal ini merupakan perbuatan kriminal karena menyalahi aturan yang berlaku. Contoh penggelapan pajak diantaranya melaporkan penjualan lebih kecil dari data sebenarnya, menggelembungkan biaya perusahaan dengan membebaskan biaya fiktif, melakukan transaksi ekspor fiktif, dan memalsukan dokumen keuangan perusahaan.

Penggelapan pajak merupakan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Sehingga perlu dilakukan usaha atau strategi tertentu untuk mengurangi pajak terhutangnya dengan

cara yang masih dalam lingkup peraturan perpajakan. Usaha atau strategi yang dilakukan untuk mengurangi pajak terhutang merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*).

Pada umumnya perencanaan pajak mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar pajak terhutangnya berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam peraturan perpajakan. Umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba perusahaan.

Menurut Karayan dalam Omposunggu (2011) Perencanaan pajak mencakup pemahaman dan implementasi dari berbagai strategi yang dapat meminimalisasi jumlah beban pajak dalam beberapa periode. Perencanaan pajak yang baik dapat menjadi sumber penyediaan modal kerja perusahaan. Selanjutnya Omposunggu (2011) mengemukakan bahwa ruang lingkup perencanaan pajak, yaitu : 1) Upaya legal untuk menghemat beban pajak dengan memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan (*loopholes*) dengan berbagai metode berikut ini : (a) *Maximizing tax deductible* : upaya membebaskan biaya-biaya usaha baik yang dikeluarkan secara tunai maupun dalam bentuk non tunai semaksimal mungkin yang diperbolehkan undang-undang, (b) *Legal standing of corporate entity* : mencari bentuk usaha yang tepat, seperti CV/Fa atau PT, dengan tujuan menghemat pajak, (c) Melakukan konglomerasi usaha : berupa penyatuan bentuk usaha secara vertical dan horizontal, (d) Memecah satu unit usaha menjadi beberapa perusahaan, (e) *Tax deferred income* : menunda pengakuan penghasilan. 2) Mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sehingga utang pajak, baik PPh maupun pajak-pajak lainnya dalam posisi sehemat mungkin sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak. 3) Mendeteksi cacat teoritis dan ketentuan Undang-undang Pajak untuk menemukan cara penghindaran pajak yang dapat menghemat pembayaran pajak.

Tujuan yang diharapkan dengan adanya perencanaan pajak menurut Pohan (2013) adalah Meminimalisasi beban pajak yang terhutang, memaksimalkan laba setelah pajak, meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus, dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak banyak macamnya. Salah satunya adalah Pajak Penghasilan Badan, yaitu pajak yang dikenakan kepada badan usaha atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Objek pajak PPh Badan

adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak Badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Untuk memperoleh laba bersih, maka penghasilan harus dikurangi dengan pengeluaran/beban yang diakui secara fiskal atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto seperti biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, penyusutan aktiva, biaya beasiswa dan magang, dan lain-lain. Sedangkan pengeluaran/beban yang tidak diakui secara fiskal atau biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto seperti biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sanksi administrasi, pajak penghasilan dan lain-lain. Besarnya Pajak Penghasilan Badan terhutang dipengaruhi oleh besarnya laba perusahaan dikalikan dengan tarif pajak.

Strategi yang dapat digunakan untuk meminimumkan Pajak Penghasilan Badan terhutang menurut Omposunggu (2011) membebankan biaya-biaya usaha, baik yang dikeluarkan secara tunai maupun dalam bentuk nontunai semaksimal mungkin yang diperbolehkan undang-undang. Selanjutnya menurut Suandy (2011) strategi yang dapat digunakan untuk meminimumkan Pajak Penghasilan Badan yaitu transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak (*with holding tax*).

Bagi perusahaan pajak penghasilan tersebut cukup besar. Hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi manajemen perusahaan untuk mengetahui dan memahami segala konsekuensi pajak dari setiap transaksi serta setiap keputusan bisnis dan manajerialnya, apabila mereka bermaksud untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang dapat diberikan kepada para pemilik atau pemegang saham.

KAJIAN LITERATUR

Perencanaan Pajak

Suandy (2011) Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah meminimumkan kewajiban pajak.

Menurut Pohan (2013) ada 2 hal penting yang dapat diambil sebagai manfaat dari melaksanakan perencanaan pajak, yaitu: (a) Penghematan kas keluar karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi. (b) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash*

flow) karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Menurut Suandy (2011) jenis-jenis perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (a) Perencanaan pajak nasional (*national tax planning*), (b) Perencanaan pajak internasional (*international tax planning*). Dari kedua jenis perencanaan pajak tersebut terdapat perbedaan yang melekat antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional, yaitu terletak pada peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undang-undang domestik, sedangkan perencanaan pajak internasional disamping undang-undang domestik juga harus memperhatikan perjanjian pajak (*tax treaty*) dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat.

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (*global company strategy*) juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, maka agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan.

Adapun tahapan-tahapan dalam membuat perencanaan pajak menurut Suandy (2011:13) adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis informasi yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut:

- a. Pemilihan bentuk transaksi yang akan dilakukan oleh perusahaan atau hubungan internasional.
- b. Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.
- c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban pajak tersebut akan dihitung dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

- a. Bagaimana jika perencanaan pajak tidak dilaksanakan
 - b. Bagaimana jika perencanaan pajak tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik
 - c. Bagaimana jika perencanaan pajak tersebut dilaksanakan tetapi gagal.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Pembuatan suatu rencana sebaiknya disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba setelah pajak yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian jika terjadi kegagalan.

5. Memutakhirkan rencana pajak

Dengan membiarkan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

Strategi yang dapat digunakan untuk meminimumkan/penghematan pajak terhutang menurut Suandy (2011) sebagai berikut:

- a. Pemilihan alternatif dasar pembukuan, basis kas atau basis akrual,
- b. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan,
- c. Pemilihan metode penilaian persediaan,
- d. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap,
- e. Pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud,
- f. Transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak (*with holding tax*),
- g. Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar,
- h. Permohonan penurunan pembayaran angsuran masa (PPh Pasal 25 bulanan),
- i. Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan Pasal 23,
- j. Rekonsiliasi SPT,
- k. Penyertaan modal pada perseroan terbatas dalam negeri.

Pajak Penghasilan Badan Terhutang

Peraturan undang-undang yang mengatur tentang Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo (2011) adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Bagi Wajib Pajak Badan yang dalam penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terhutang dalam suatu tahun pajak, maka terlebih dahulu harus dihitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan. Secara umum Pajak Penghasilan Badan untuk suatu tahun pajak menurut Waluyo (2010) dihitung dengan rumus: $\text{Pajak Penghasilan Badan} = \text{Tarif Pajak (PPh Pasal 17)} \times \text{PKP}$. Tarif pajaknya adalah 28% pada tahun 2009, kemudian berubah menjadi 25% mulai tahun 2010.

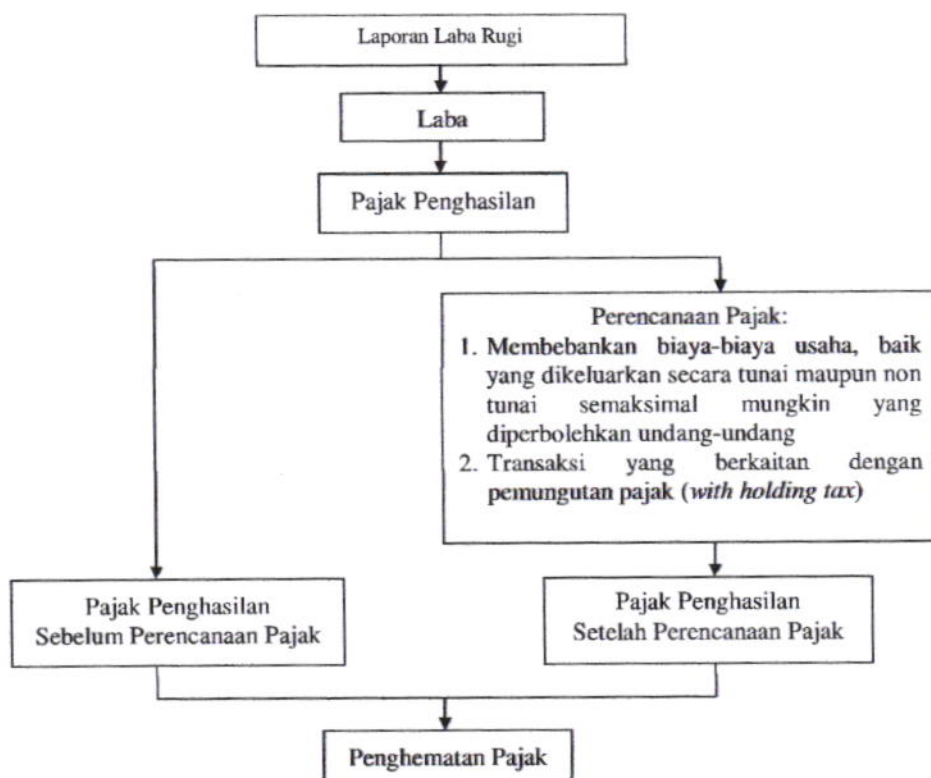
Dalam melakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak terdapat biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan ada biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
2. Penyusutan.
3. Iuran kepada dana pensiun.
4. Kerugian karena penjualan.
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial.
12. Sumbangan fasilitas pendidikan
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.

Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto (*nondeductible expense*) menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1)

adalah:

1. Pembagian laba.
2. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
5. Penggantian atau imbalan.
6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham.
7. Harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan.
8. Pajak Penghasilan.
9. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer.
11. Sanksi administrasi.



Gambar 1
Kerangka Pikir Perencanaan Pajak dalam Meminimumkan Pajak Penghasilan Badan Terhutang

Pada umumnya perencanaan pajak (*tax planning*) mengacu pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian perencanaan pajak dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu, sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dengan cara yang benar. Adapun gambar kerangka pikir dapat dilihat pada gambar 1.

METODE PENELITIAN

Untuk lebih memperjelas tentang *tax planning* dalam meminimalkan pajak terutang (sebelum dan setelah menerapkan *tax planning*) berikut ini diambil contoh pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk berikut ini.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan laba rugi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan sampel dalam penelitian ini adalah data laporan laba rugi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. tahun 2009-2011. Metode analisis yang digunakan adalah analisis komparatif yaitu analisis yang digunakan untuk membandingkan antara penghitungan PPh Badan yang berdasarkan perencanaan pajak dengan penghitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk itu akan digunakan beberapa metode analisis sebagai berikut:

1. Analisis besarnya pajak sebelum perencanaan pajak pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. yaitu berdasarkan perhitungan pajak penghasilan badan dari laporan laba rugi komersial yang dilakukan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tahun 2009 -2011
2. Analisis besarnya pajak setelah perencanaan pajak pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan konsep perencanaan pajak dilakukan dengan : (a) Membebaskan biaya-biaya usaha, baik yang dikeluarkan secara tunai maupun non-tunai semaksimal mungkin yang diperbolehkan undang-undang. Perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, seperti biaya magang. (b) Transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak (*with holding tax*), misalnya PPh pasal 23 atas jasa-jasa profesional. Perusahaan memperhitungkan nilai transaksi supaya nilai tersebut sudah termasuk pajak, karena jika perusahaan hanya

membayar PPh pasal 23 maka PPh yang dibayar oleh perusahaan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

3. Analisis perbandingan besarnya pajak sebelum perencanaan pajak dan besarnya pajak setelah perencanaan pajak. Setelah itu dihitung besarnya kenaikan/penurunan perencanaan pajak.

Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meminimumkan pajak terhutang, pada hal masih banyak strategi yang mungkin dapat dilakukan yang dibolehkan aturan perpajakan.
2. Kajian teori atau referensi pada umumnya dari literatur dalam negeri, tanpa melengkapi literatur atau jurnal asing yang bisa lebih menambah wawasan atau perbandingan penerapan perencanaan pajak di negara lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Besarnya Pajak Sebelum Perencanaan Pajak pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Perencanaan Pajak bertujuan untuk membuat agar beban pajak yang harus dibayar dapat ditekan seminimal mungkin dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang berlaku. Berikut gambaran data besarnya Pajak Penghasilan Badan sebelum perencanaan pajak pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Tahun 2009-2011.

Tabel 1
Pajak Penghasilan Badan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Sebelum Perencanaan Pajak
(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Laba Sebelum Pajak	Besarnya PPh Badan Sebelum Perencanaan Pajak	Penurunan (%)
2009	66.372.520	44.023.232	22.349.288	6.257.800,64	-
2010	69.496.069	48.079.718	21.416.351	5.354.087,75	0,14
2011	71.918.000	51.061.000	20.857.000	5.214.250,00	0,02

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa tahun 2009-2011 total pendapatan usaha mengalami peningkatan. Tahun 2010 meningkat 0,04 persen dari tahun 2009 yang disebabkan peningkatan pendapatan telepon, pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, dan pendapatan lain-lain bersih. Tahun 2011 total pendapatan usaha juga meningkat 0,03 persen dari tahun 2010 yang disebabkan peningkatan

pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika, pendapatan jaringan, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, dan penghasilan lain-lain.

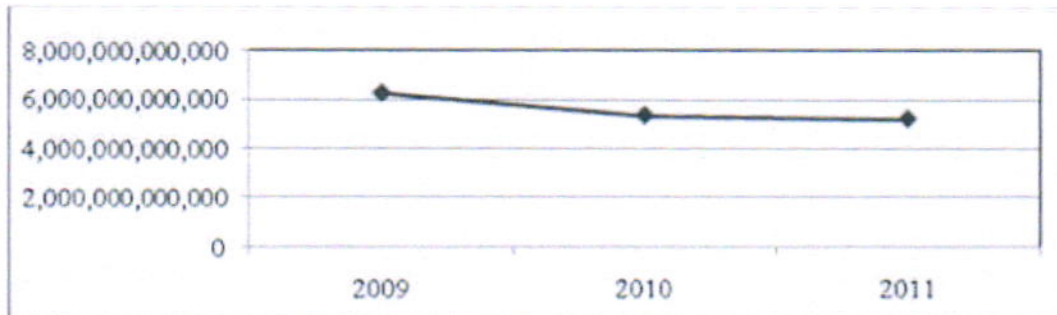
Tahun 2009-2011 total beban usaha juga mengalami peningkatan. Tahun 2010 meningkat 0,08 persen dari tahun 2009 yang disebabkan meningkatnya beban penyusutan 0,13 persen dari tahun 2009, beban karyawan menurun 0,12 persen disebabkan karena dihilangkannya beban untuk program pendidikan dan pengobatan. Beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi meningkat 0,09 persen dari tahun 2009, beban umum dan administrasi menurun 0,41 persen yang disebabkan dihilangkannya beban amortisasi *goodwill* dan asset tidak berwujud lainnya. Beban pemasaran meningkat 0,10 persen. Adanya beban interkoneksi yang sebelumnya di tahun 2009 beban ini tidak ada.

Tahun 2011 total beban usaha meningkat 0,05 persen dari tahun 2010 yang disebabkan meningkatnya beban penyusutan 0,016 persen dari tahun 2009, beban karyawan meningkat 0,12 persen disebabkan diadakannya kembali beban untuk program pendidikan yang sebelumnya di tahun 2010 tidak ada. Beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi meningkat 0,19 persen dari tahun 2009, beban umum dan administrasi meningkat 0,19 persen yang disebabkan peningkatan beban penyesuaian piutang ragu-ragu dan persediaan usang, jasa profesional, penelitian dan pengembangan. Beban pemasaran meningkat 0,22 persen. Beban interkoneksi juga meningkat 0,13 persen. Adanya beban untuk (rugi) laba selisih kurs, bagian rugi bersih entitas asosiasi, dan beban lain-lain yang sebelumnya di tahun 2009 dan 2010 beban ini tidak ada.

Meningkatnya beban usaha tahun 2009-2011 menjadikan laba yang dihasilkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. semakin menurun. Besarnya laba berpengaruh pada besarnya Pajak Penghasilan Badan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dimana tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan adalah 28% pada tahun 2009 kemudian berubah menjadi 25% mulai tahun 2010, sehingga tahun 2009 Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp6.257.800.640.000, tahun 2010 Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp5.354.087.750.000, dan tahun 2011 Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp5.214.250.000.000.

Secara umum Pajak Penghasilan Badan tahun 2009-2011 menurun, dari tahun 2009 ke tahun 2010 Pajak Penghasilan Badan menurun Rp903.712.890.000 atau sebesar 0,14 persen. Begitupun dari tahun 2010 ke tahun 2011 Pajak Penghasilan Badan menurun Rp139.837.750.000 atau 0,02 persen.

Secara visual perkembangan Pajak Penghasilan Badan sebelum perencanaan pajak pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. tahun 2009-2011 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2
Grafik Besarnya Pajak Penghasilan Badan Sebelum Perencanaan Pajak

Pada gambar 2 terlihat dengan jelas besarnya Pajak Penghasilan Badan sebelum perencanaan pajak PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. mengalami penurunan dari tahun 2009-2011. Hal tersebut disebabkan beberapa beban operasi perusahaan yang mengalami peningkatan yang mempengaruhi laba kena pajak menurun.

Analisis Besarnya Pajak Penghasilan Badan Setelah Perencanaan Pajak pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Strategi yang digunakan untuk meminimumkan Pajak Penghasilan Badan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. berdasarkan konsep perencanaan pajak diantaranya:

1. Membebaskan biaya-biaya usaha, baik yang dikeluarkan secara tunai maupun dalam bentuk nontunai semaksimal mungkin yang diperbolehkan undang-undang, misalnya beban magang.

a. Magang

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. tahun 2009-2011 menerima masing-masing 2 karyawan magang dari 7 wilayah divisi regional Telkom dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung program PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. selama 1 bulan tiap semester. Masing-masing akan diberi uang saku sebesar Rp3.000.000,00 per bulan.

Biaya perjalanan untuk karyawan magang tiap semester ditanggung oleh divisi masing-masing. Berikut rinciannya :

- Divisi Regional I Sumatera
- $\text{Rp}950.000,00 \times 2 \text{ karyawan} = \text{Rp}1.900.000,00$

- Divisi Regional II Jakarta
- $\text{Rp}120.000,00 \times 2 \text{ karyawan} = \text{Rp}240.000,00$
- Divisi Regional III Jawa Barat
- Tidak ada
- Divisi Regional IV Jawa Tengah dan Yogyakarta
- $\text{Rp}917.500,00 \times 2 \text{ karyawan} = \text{Rp}1.835.000,00$
- Divisi Regional V Jawa Timur
- $\text{Rp}626.000,00 \times 2 \text{ karyawan} = \text{Rp}1.252.000,00$
- Divisi Regional VI Kalimantan
- $\text{Rp}1.000.000 \times 2 \text{ karyawan} = \text{Rp}2.000.000,00$
- Divisi Regional VII Kawasan Timur
- $\text{Rp}670.000,00 \times 2 \text{ karyawan} = \text{Rp}1.340.000,00$

Total Biaya perjalanan untuk karyawan magang per semester sebesar $\text{Rp}8.567.000,00$.

Sehingga total beban magang tahun 2009-2011 adalah sebagai berikut :

- Uang Saku
 $= 2 \text{ karyawan} \times 7 \text{ wilayah divisi regional Telkom} \times \text{Rp}3.000.000,00 \times 2 \text{ semester}$
 $= \text{Rp}84.000.000,00$
- Biaya Perjalanan
 $= \text{Rp} 8.567.000,00 \times 2 \text{ semester} \quad = \text{Rp}17.134.000,00$
- Jumlah
 $= \text{Rp}84.000.000,00 + \text{Rp}17.134.000,00 \quad = \text{Rp}101.134.000,00$

2. Transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak (*with holding tax*) misalnya PPh pasal 23 atas jasa profesional. Perusahaan sebaiknya memperhitungkan nilai transaksi supaya nilai tersebut sudah termasuk pajak, karena jika perusahaan hanya membayar PPh pasal 23 maka PPh yang dibayar oleh perusahaan tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Sebelum melakukan transaksi, pihak perusahaan melakukan persetujuan terlebih dahulu agar pihak ketiga bersedia dipotong pajaknya. Ini merupakan tindakan baik untuk mengantisipasi konflik kepentingan antara pemotong dan yang dipotong jika penerima penghasilan tidak mau dipotong pajaknya. Dalam memotong pajak pihak ketiga, perusahaan harus memotong dengan benar dan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, serta menyetorkannya sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga perusahaan dapat terhindar dari sanksi akibat pelanggaran aturan perpajakan.

a. Untuk *me-mark up* jasa profesional yaitu dengan menghitung menurut Suandy (2011)

Nilai transaksi	= Jasa profesional x 100/98
PPh pasal 23	= 2% x nilai transaksi
Penghematan pajak	= tarif PPh Badan x PPh pasal 23
Pembayaran Neto /	= Nilai transaksi – penghematan pajak
Beban Jasa Profesional	

Berikut hasil perhitungannya:

Tahun 2009

Nilai transaksi	= Rp184.546.000.000 x 100/98
	= Rp188.312.244.898
PPh pasal 23	= 2% x Rp188.312.244.898
	= Rp3.766.244.898
Penghematan pajak	= 28% x Rp3.766.244.898
	= Rp1.054.548.571
Pembayaran Neto	= Rp188.312.244.898 – Rp1.054.548.571
	= Rp187.257.696.327

Tahun 2010

Nilai transaksi	= Rp162.561.000.000 x 100/98
	= Rp165.878.571.429
PPh pasal 23	= 2% x Rp165.878.571.429
	= Rp3.317.571.429
Penghematan pajak	= 25% x Rp3.317.571.429
	= Rp829.392.857
Pembayaran Neto	= Rp165.878.571.429 – Rp829.392.857
	= Rp165.049.178.571

Tahun 2011

Nilai transaksi	= Rp235.000.000.000 x 100/98
	= Rp239.795.918.367
PPh pasal 23	= 2% x Rp239.795.918.367
	= Rp4.795.918.367
Penghematan pajak	= 25% x Rp4.795.918.367
	= Rp1.198.979.592
Pembayaran Neto	= Rp239.795.918.367 – Rp1.198.979.592

= Rp238.596.938.776

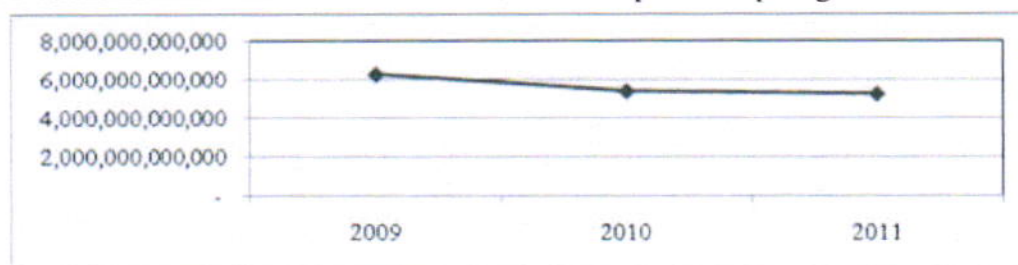
Berikut gambaran data besarnya Pajak Penghasilan Badan setelah perencanaan pajak pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Tahun 2009-2011.

Tabel 2
Pajak Penghasilan Badan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2009-2011 (dalam Jutaan Rupiah).

Tahun	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Laba Sebelum Pajak	Besarnya PPh Badan Setelah Perencanaan Pajak	Penurunan (%)
2009	66.372.520	44.025.587	22.346.938	6.257.141,00	-
2010	69.496.069	48.082.307	21.413.767	5.353.440,50	0,16
2011	71.918.000	51.064.698	20.853.307	5.213.325,50	0,02

Pada tabel 2, terlihat total pendapatan usaha dan beban usaha tahun 2009-2011 mengalami peningkatan. Meningkatnya beban usaha tahun 2009-2011 menjadikan laba yang dihasilkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk semakin menurun. Perolehan laba berpengaruh pada besarnya Pajak Penghasilan Badan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Besarnya Pajak Penghasilan Badan setelah perencanaan pajak pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. selama tahun 2009-2011. Tahun 2009 ke tahun 2010 Pajak Penghasilan Badan meningkat Rp903.700.250.000 atau sebesar 0,16 persen. Tahun 2010 ke tahun 2011 Pajak Penghasilan Badan menurun Rp140.115.000.000 atau 0,02 persen.

Pajak Penghasilan Badan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. menurun karena diterapkannya perencanaan pajak sesuai strategi yang dapat digunakan untuk meminimumkan Pajak Penghasilan Badan, seperti penambahan biaya yang secara langsung bermanfaat untuk perusahaan seperti beban magang dan memperhitungkan nilai transaksi untuk jasa profesional (PPh pasal 23) supaya nilai tersebut sudah termasuk pajak dan dapat dibebankan sebagai biaya. Secara visual perkembangan Pajak Penghasilan Badan setelah perencanaan pajak pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Tahun 2009-2011 dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3
Grafik Besarnya Pajak Penghasilan Badan Setelah Perencanaan Pajak

Pada gambar 3 terlihat dengan jelas besarnya Pajak Penghasilan Badan setelah perencanaan pajak PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. mengalami penurunan dari tahun 2009-2011. Penurunan tersebut disebabkan karena perusahaan menerapkan perencanaan pajak yang meliputi pembebanan beban magang, dan juga pembebanan jasa profesional.

Analisis Perbandingan Besarnya Pajak Sebelum Perencanaan Pajak dan Besarnya Pajak Setelah Perencanaan Pajak

Tabel 3
Perbandingan Pajak Penghasilan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Sebelum Perencanaan Pajak dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2009-2011

Tahun	Besarnya Pajak Sebelum Perencanaan Pajak	Besarnya Pajak Setelah Perencanaan Pajak	Selisih	Penurunan
2009	6.257.800.640.000	6.257.141.000.000	659.640.000	5,27%
2010	5.354.087.750.000	5.353.440.500.000	647.280.000	6,04%
2011	5.214.250.000.000	5.213.325.500.000	924.530.000	8,86%
Rata-rata	5.608.712.796.667	5.607.969.000.000	743.796.667	6,72%

Pada tabel 3 dapat dilihat perbandingan besarnya Pajak Penghasilan Badan sebelum perencanaan pajak dan setelah perencanaan pajak pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. selama tahun 2009-2011. Perbandingan besarnya Pajak Penghasilan Badan sebelum dan setelah perencanaan pajak tahun 2009 menurun sebesar 5,27 persen, tahun 2010 perbandingan besarnya Pajak Penghasilan Badan sebelum dan setelah perencanaan pajak menurun sebesar 6,04 persen, dan tahun 2011 perbandingan besarnya Pajak Penghasilan Badan sebelum dan setelah perencanaan pajak menurun 8,86 persen.

Penurunan besarnya Pajak Penghasilan Badan sebelum perencanaan pajak dan setelah perencanaan disebabkan karena penerapan dari strategi yang dilakukan dalam perencanaan pajak dalam meminimumkan Pajak Penghasilan Badan.

Untuk menguji hipotesis yang menduga terdapat perbedaan besarnya pajak sebelum perencanaan pajak dan setelah perencanaan pajak, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji t dua sampel berpasangan. Adapun keputusan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan adalah jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada taraf signifikan 5 persen artinya tidak ada perbedaan yang signifikan pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak dan setelah perencanaan pajak. Sebaliknya jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan 5 persen artinya terdapat perbedaan yang signifikan pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak dan setelah perencanaan pajak. Berdasarkan persyaratan tersebut, maka terlebih dahulu dicari nilai statistik uji menggunakan rumus menurut Subagyo (2009) sebagai berikut:

$$t = \frac{D}{\left(\frac{SD}{\sqrt{n}}\right)}$$

Dari rumus tersebut di atas, maka untuk memperoleh nilai statistik uji dapat dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4
Data Besarnya Pajak Penghasilan Badan Sebelum Perencanaan Pajak dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2009-2011

Tahun	Besarnya Pajak Sebelum Perencanaan Pajak	Besarnya Pajak Setelah Perencanaan Pajak	Selisih
2009	6.257.800.640.000	6.257.141.000.000	659.640.000
2010	5.354.087.750.000	5.353.440.500.000	647.280.000
2011	5.214.250.000.000	5.213.325.500.000	924.530.000
Rata-Rata			743.796.667
Standar Deviasi			156.616.248

Dari nilai rata-rata dan standar deviasi maka dapat dicari nilai statistik uji t dengan perhitungan sebagai berikut:

$$t = \frac{743.796.667}{156.616.248 / \sqrt{3}}$$

$$t = \frac{743.796.667}{156.616.248 / 1,73205}$$

$$t = \frac{743.796.667}{90.422.433}$$

$$t = 8,226$$

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 8,226, nilai tersebut sama dengan hasil pengolahan menggunakan software SPSS berikut ini:

	Paired Differences						df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t		
				Lower	Upper			
Pair 1: Sebelum-Eksploitasi	7,438E8	1,536E3	30627036,71	3,547E8	1,33E9	8,223	2	,000

Gambar 4.
Paired Samples Test

Selanjutnya nilai t yang diperoleh dibandingkan dengan t_{tabel} , pada tingkat kekeliruan 5 persen dan derajat bebas 2 diperoleh nilai t pada pengujian dua arah sebesar 4,303. Hasil tersebut menunjukkan bahwa t_{hitung} (8,226) > dari t_{tabel} (4,303), sehingga dengan tingkat kepercayaan

95 persen disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan Pajak Penghasilan Badan sebelum perencanaan pajak dan setelah perencanaan pajak pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Perencanaan Pajak dalam Meminimumkan Pajak Penghasilan Badan terutang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perbandingan besarnya Pajak Penghasilan Badan sebelum perencanaan pajak dan setelah perencanaan pajak diperoleh tahun 2009 mengalami penurunan 5,27 persen, tahun 2010 mengalami penurunan 6,04 persen, dan tahun 2011 juga mengalami penurunan 8,86 persen.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan Pajak Penghasilan Badan sebelum dan setelah perencanaan pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t dua sampel berpasangan yang menunjukkan nilai t_{hitung} (8,226) > dari nilai t_{tabel} (4,303) sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan Pajak Penghasilan Badan sebelum dan setelah penerapan perencanaan pajak dalam meminimumkan Pajak Penghasilan Badan terutang pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diajukan saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dalam mengambil keputusan yaitu :
Sebaiknya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan dengan catatan biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak seperti biaya magang dan sebaiknya memperhitungkan nilai transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak (*with holding tax*) misalnya PPh pasal 23 atas jasa profesional supaya nilai tersebut sudah termasuk pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. 2009. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Omposunggu Arles P.. 2011. *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta: Puspa Swara.

Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suandi Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Subagyo Pangestu. 2009. *Statistik Deskriptif*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Waluyo. 2010. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sumber lain :

www.telkom.co.id